

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen Modal Manusia

Teori pertumbuhan ekonomi menjabarkan faktor penyebab peningkatan produksi dalam periode jangka panjang serta hubungan antar faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan. Pada teori pertumbuhan klasik Adam Smith, unsur utama produksi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal. Pada teori ini faktor produksi utama adalah sumber daya alam, sedangkan sumber daya manusia bersifat pasif. Sehingga pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada jumlah kekayaan sumber daya alam suatu negara. Sedangkan pada teori Neoklasik (Solow-Swan), pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor produksi seperti penduduk dan tenaga kerja. Pada teori ini, teknologi dan ilmu pengetahuan telah dianggap sebagai unsur pembentuk pertumbuhan ekonomi, namun masih dianggap sebagai faktor eksogen.

Kemudian dikemukakan Teori Pertumbuhan Endogen milik Paul Romer. Teori ini memandang pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh faktor produksi endogen. Sehingga perlu dilakukan analisis faktor endogen pertumbuhan ekonomi agar dapat digunakan sebagai bahan penyusun sistem ekonomi. Berbeda dengan teori Neoklasik Solow, teori ini memandang ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi sebagai faktor endogen yang dapat diusahakan oleh wilayah tersebut (Wijayanto, 2019). Selain itu, Romer juga menekan bahwa terdapat 3 unsur utama

dalam pertumbuhan ekonomi yang belum diperhitungkan dalam teori Neoklasik Solow, yakni perkembangan teknologi sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, ide perusahaan sebagai akibat bertambahnya ilmu pengetahuan (*knowledge spillover*), dan produksi barang konsumsi akan tak terbatas bila perkembangan ilmu pengetahuan terus berlanjut (Yanke et al., 2022).

Teori pertumbuhan endogen sederhana memiliki persamaan sebagai berikut

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

Dengan keterangan Y melambangkan output, A melambangkan total faktor produktivitas, K melambangkan modal dan L menggambarkan tenaga kerja, dan α menggambarkan elastisitas output modal. Dalam persamaan ini seluruh modal belum didefinisikan ke dalam jenis yang lebih spesifik (Juhro & Trisnanto, 2018).

Kemudian model tersebut dikembangkan oleh Lucas (1988) dengan membedakan modal ke dalam dua jenis, modal fisik dan modal manusia. faktor modal manusia (H) didapatkan dari hasil pembelajaran yang akan meningkatkan kemampuan produksi pekerja. Selain itu modal manusia juga akan meningkatkan teknologi. Maka investasi terhadap modal manusia, dalam kondisi tenaga kerja yang tetap ($L=1$) didapatkan persamaan sebagai berikut

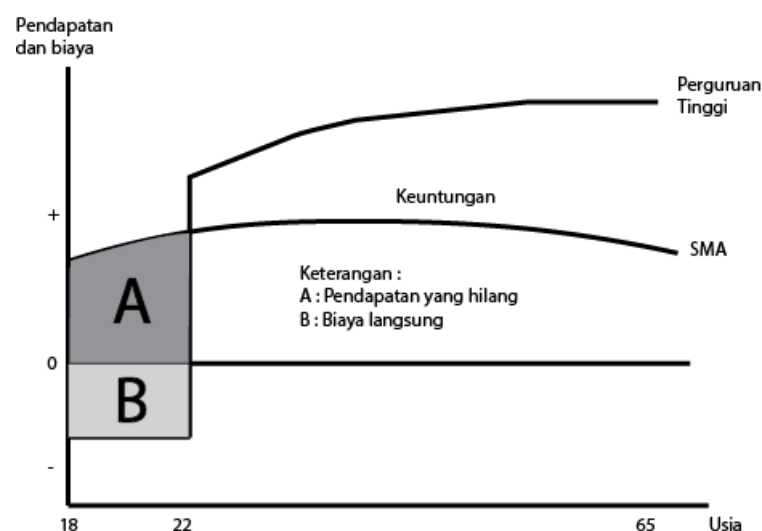
$$Y = K^{\alpha} \cdot H^{1-\alpha}$$

Pada teori lain, pendidikan pada modal manusia juga dianggap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan teori mengenai modal manusia atau *Human Capital Theory* yang dikemukakan oleh Becker (1964), peningkatan kualitas pendidikan manusia meningkatkan tingkat pendapatan pekerja. Sehingga dikembangkan model mengenai investasi pendidikan pada

masing-masing individu. Pendidikan dan pelatihan adalah hal paling penting dalam investasi pada sumber daya manusia. Tingkat upah yang dimiliki oleh orang yang berpendidikan tinggi akan lebih tinggi daripada standar. Efek peningkatan tingkat upah terhadap pendidikan ini dampaknya lebih terasa pada negara berkembang.

Kejadian tersebut berkaitan erat terhadap kondisi ekonomi masyarakat di negara berkembang. Sesuai pendapat dari Lucas, bahwa pendidikan merupakan suatu bentuk investasi pada modal manusia. Hal ini karena merujuk pada pengeluaran yang dikeluarkan untuk pendidikan, tidak dapat dinikmati hasilnya secara langsung, melainkan pada masa yang akan datang. Bentuk investasi pendidikan adalah berupa biaya untuk mendapatkan pendidikan tersebut ditambah dengan hilangnya potensi penghasilan atau *opportunity cost* bila ia tidak bersekolah. Pengambilan Keputusan untuk menjalani pendidikan adalah dengan harapan akan menerima pendapatan lebih tinggi di masa depan.

Gambar 4 Pendapatan dan Biaya atas Investasi Pendidikan



Sumber: Bruce E. Kaufman dan Julie L. Hotchkiss, 1999, hal : 341

Secara grafis, pengeluaran investasi terhadap pendidikan dapat diilustrasikan melalui gambar 2 di atas. Besarnya investasi yang dikeluarkan oleh individu jika

menempuh pendidikan tinggi adalah sebesar luas area A dan area B. Namun dalam jangka panjang, besarnya keuntungan dari menyelesaikan pendidikan tinggi dapat dilihat dari jarak antara kurva pendapatan pada Perguruan Tinggi dibanding dengan kurva SMA. Tampak juga kurva Perguruan Tinggi terus meningkat seiring bertambahnya usia individu, sedangkan pada kurva SMA terdapat kecenderungan pendapatan yang semakin menurun (Atmanti, 2005).

2.1.2. Tingkat Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang menjadi prioritas nasional. Jika melihat dari dimensi pembangunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), salah satunya adalah dimensi pendidikan. Komponen pembentuk dimensi pendidikan tersebut salah satunya adalah APK PT. Selain itu, capaian APK PT juga sering digunakan untuk melihat kinerja pendidikan di Indonesia. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) APK PT digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja pendidikan pada tingkat dasar dan menengah.

Pada penelitian lain, bila APK PT disandingkan dengan RLS dan APK SM dapat mengukur ketimpangan pembangunan pendidikan di daerah (Pemprov Banten, 2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek (2022) menjabarkan bahwa APK dan APM dapat menggambarkan kondisi suatu wilayah untuk kemudian dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pengembangan wilayah tersebut. Oleh sebab itu APK PT juga menjadi salah satu indikator dalam perencanaan pembangunan nasional, yakni dalam RPJMN 2020-

2024 yang menargetkan APK PT pada tahun 2024 mencapai 37,63. Namun realisasi pada tahun 2022 masih jauh dari target tersebut.

Capaian APK PT merupakan capaian APK terendah dari jenjang pendidikan yang di bawahnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka tingkat partisipasi akan semakin rendah (Pattinasarany & Kurniawan, 2021). Hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya biaya dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan. Sehingga kalangan masyarakat yang mampu menjangkau biaya pendidikan tinggi juga semakin terbatas.

Pandangan tradisional menempatkan pendidikan sebagai pelayanan sosial yang disediakan pemerintah kepada masyarakat, atau dalam konteks ini pendidikan dianggap sebagai *public service*. Hal ini juga diimplementasikan dalam berbagai program pemerintah dalam mendukung pendidikan, salah satunya program wajib belajar. Namun program pemerintah belum mampu mengakomodasi jenjang pendidikan tinggi secara menyeluruh, menjadikan jenjang pendidikan tinggi memiliki kecenderungan sebagai barang swasta. Hal ini menunjukkan jenjang pendidikan yang tidak dikenakan wajib belajar termasuk ke dalam *private goods* (Syukron & Zahrudin, 2022). Sehingga pengadaan pendidikan tinggi akan melibatkan pertimbangan permintaan dalam konteks bisnis. Semakin tinggi kualitas layanan yang diharapkan, maka biaya yang diperlukan juga semakin tinggi.

Agar tidak terjadi kegagalan pasar dalam pendidikan, pemerintah hadir melalui belanja pemerintah dalam bentuk pemberian layanan pendidikan melalui instansi pendidikan tinggi milik pemerintah. Instansi perguruan tinggi pemerintah sebagian besar berbentuk BLU dan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.

Dengan pemberlakuan ini, perguruan tinggi dapat lebih fleksibel dalam melakukan belanja untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Untuk memastikan biaya pendidikan yang terjangkau, pemerintah menetapkan tarif layanan yang diberikan oleh BLU agar tetap terjangkau oleh masyarakat (Kurniawan & Sugiri, 2021).

2.1.3. Belanja Negara Sektor Pendidikan

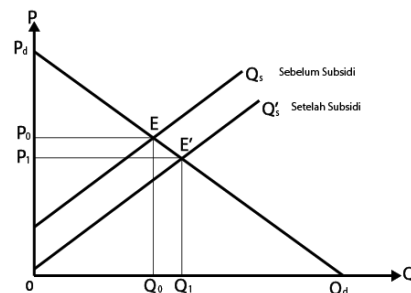
Belanja negara merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan. Pengeluaran belanja negara, biasa disebut dengan belanja pemerintah, kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa sektor sesuai dengan program yang dibiayai oleh pemerintah. Sehingga, untuk belanja pemerintah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pendidikan atau menunjang pelaksanaan pendidikan, disebut dengan belanja pemerintah di bidang pendidikan. Seluruh belanja pemerintah pendidikan sebelum digunakan, wajib masuk ke dalam dokumen anggaran negara. Kemudian anggaran tersebut akan dilakukan pembelanjaan sesuai dengan ketentuan pada tahun berjalan.

Berdasarkan persamaan ekonomi dalam menghitung penerimaan nasional, terdapat rumus $Y = C + I + G + NX$. Di mana Y adalah jumlah penerimaan negara yang mewakili Produk Domestik Bruto dan G adalah jumlah belanja pemerintah. Dari rumus tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan nasional dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Sehingga dengan demikian, besarnya belanja pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga akan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, karena dengan banyaknya program pendidikan yang dijalankan, akan berdampak pada kualitas pendidikan negara tersebut (Hadiyanto

et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan kualitas SDM suatu daerah meningkat karena adanya peningkatan kualitas produksi.

Implementasi dari teori belanja pendidikan telah dilaksanakan di Indonesia dengan kebijakan *mandatory spending* pada belanja APBN. Melalui berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah untuk membangun pendidikan di semua jenjang. Dampak yang dirasakan dari belanja pemerintah ini salah satunya dapat dilihat dari capaian indikator pendidikan yakni RLS, APK SM, dan APK PT yang meningkat secara agregat selama 5 tahun terakhir (Bappenas, 2021). Belanja pemerintah pusat bidang pendidikan diantaranya digunakan untuk pelaksanaan pendanaan kegiatan pada di instansi pendidikan tinggi milik pemerintah dan berupa program bantuan dana pendidikan. Bantuan dana pendidikan diantaranya adalah KIP Kuliah, Bidikmisi, Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kemendikbud Ristek dan Kemenag, dan Beasiswa Pendidikan LPDP. Bantuan tersebut dapat berperan seperti subsidi yang disalurkan kepada instansi pendidikan. Ilustrasi dampak subsidi terhadap permintaan masyarakat dapat terlihat pada Gambar 5. Belanja pemerintah dapat mengurangi besarnya biaya pendidikan (dari P_0 ke P_1) yang harus dikeluarkan masyarakat, sehingga permintaan terhadap layanan pendidikan meningkat (dari Q_0 ke Q_1) (Munawar, 2013).

Gambar 5 Ilustrasi Dampak Subsidi Terhadap Permintaan



Sumber : Munawar, 2013

2.1.4. Layanan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Layanan beasiswa yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah program beasiswa yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pelaksanaan program beasiswa LPDP bersumber dari imbal hasil pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Kemudian teknis pelaksanaannya mengacu pada kebijakan Dewan Penyantun LPDP. Berdasarkan dokumen Laporan Tahunan LPDP Tahun 2022, arahan Dewan Penyantun tentang kebijakan penyaluran beasiswa LPDP pada tahun 2022 secara umum adalah sebagai berikut:.

1. Jenis layanan beasiswa terdiri dari program gelar dan non-gelar;
2. LPDP ditugaskan untuk mendukung pendanaan dan pelaksanaan program kolaborasi di lingkungan Kementerian teknis.

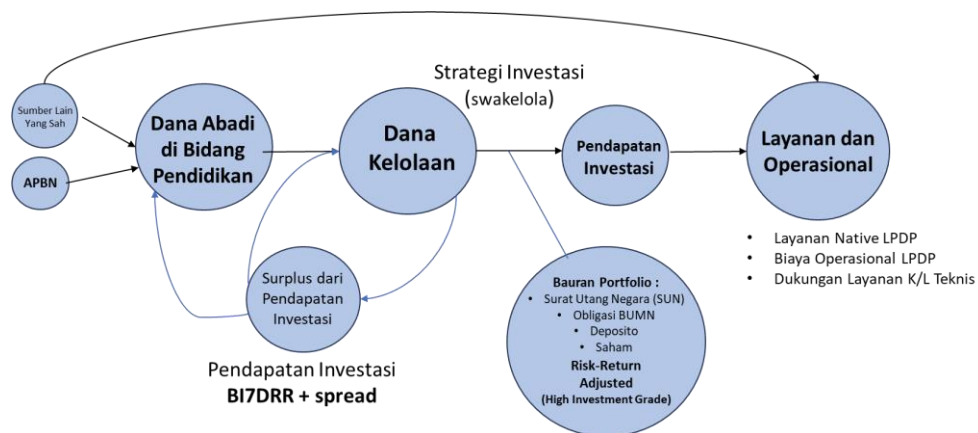
Pendanaan beasiswa native LPDP terdiri dari:

1. Beasiswa *degree* antara lain beasiswa umum, beasiswa *targeted*, dan beasiswa afirmasi;
2. Penguatan komponen program termasuk ke dalam layanan beasiswa antara lain persiapan keberangkatan, pengayaan bahasa/akademik khusus untuk program afirmasi, dan pengelolaan alumni.
3. Program/beasiswa lainnya sesuai arahan Ketua Dewan Penyantun.

Selain itu, LPDP juga mendukung pembiayaan dan pelaksanaan program layanan bidang pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam mewujudkan SDM Unggul yang termasuk program beasiswa *degree* dan *non degree* serta melanjutkan pendanaan beasiswa yang sedang berjalan (*on going*).

Pendanaan pendidikan melalui LPDP merupakan salah satu bentuk kebijakan pendanaan pendidikan untuk tidak terlalu membebani belanja pemerintah. Karena pendanaan yang dilakukan oleh LPDP menerapkan kebijakan dana abadi yang dapat dikelola untuk mendapatkan keuntungan, yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk belanja pemerintah dalam rangka penyediaan layanan. Oleh sebab itu LPDP menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Sehingga pendanaan pada layanan beasiswa pendidikan yang disediakan LPDP dapat berjalan secara mandiri tanpa membebani APBN. Alur pendanaan tersebut dijelaskan pada diagram berikut :

Gambar 6 Proses Bisnis Skema Layanan LPDP



Sumber : Laporan Kinerja LPDP 2022

Layanan yang dikelola LPDP tersebut, khususnya beasiswa diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi. Seperti yang dijabarkan dalam penelitian BPS (2022b), faktor utama pendorong masyarakat dalam mengikuti pendidikan adalah faktor ekonomi. Oleh sebab itu dengan adanya beasiswa LPDP, diharapkan masyarakat yang mampu menjangkau jenjang pendidikan tinggi dapat meningkat. Karena sesuai informasi mengenai

beasiswa dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk melanjutkan ke pendidikan pada selanjutnya (Marlyana et al., 2019).

Dikutip dari halaman *website* LPDP, beasiswa LPDP berfokus pada peningkatan sumber daya manusia untuk percepatan pembangunan Indonesia, serta menciptakan generasi penerus tongkat kepemimpinan dan mampu bersaing secara global. Sehingga mayoritas beasiswa yang diluncurkan adalah untuk jenjang pendidikan Strata 2 dan Strata 3. Selain menjawab tantangan global, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa tenaga pengajar untuk pendidikan tinggi minimal adalah Magister. Sehingga secara jangka panjang, program yang dijalankan oleh LPDP dapat mengembangkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai bagaimana efektivitas belanja pemerintah di bidang pendidikan dan pelaksanaan beasiswa terhadap APK jenjang Sekolah Dasar dan Menengah telah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang dilakukan secara mendalam mengenai pengaruh belanja pemerintah pusat bidang pendidikan terhadap APK Perguruan Tinggi belum dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1 Literatur Reviu

No.	Variabel	Judul / Penulis	Hasil
1	1. Porsi Pengeluaran Pemerintah Pusat di Bidang Pendidikan Tinggi Terhadap PDB, 2. Rasio Dosen-Mahasiswa,	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Perguruan Tinggi Pada 32 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2016 / Habibah et al., 2019	Persentase Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan Tinggi Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap PDRB Provinsi. Jumlah

	3. Rasio Dosen – Desimal Mahasiswa 4. Jumlah Perguruan Tinggi 5. Populasi		Penduduk Berpengaruh Secara Signifikan Positif. Jumlah Perguruan Tinggi Tidak Mempunyai Pengaruh Signifikan. PDRB per Kapita Tidak Mempunyai Pengaruh Signifikan
2	1. APM 2. Belanja Pemerintah 3. Kemiskinan 4. Pendapatan Per Kapita	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia / Aurellin & Sentosa, 2023	Belanja Pemerintah dan Pendapatan per Kapita Berpengaruh Positif dan Signifikan dan Kemiskinan berpengaruh Signifikan Negatif Pada APM
3	1. APK Pendidikan Tinggi 2. PDRB Per Kapita 3. Tingkat Kemiskinan 4. Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga 5. Penduduk Usia Produktif	Determinan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2018 / Dharmawan, 2021	PDRB Per Kapita dan Penduduk Usia Produktif Tidak Berpengaruh Terhadap APK Perguruan Tinggi
4	1. <i>Gross Enrolment Ratio (GER)</i> 2. <i>Unemployment Rate</i> 3. GDP 4. <i>Public Expenditure on Education</i>	<i>Public Expenditure On Education, Educational Attainment And Public Expenditure On Education Unemployment Nexus In India: An Empirical Investigation / Singh & Shastri , 2020</i>	Adanya pengaruh GER dan <i>Public Expenditure on Education</i> pada <i>Unemployment Rate</i>
5	1. APM 2. Belanja Pendidikan 3. Belanja Kesehatan 4. Rasio Murid-Guru 5. Pendapatan per Kapita 6. Jumlah Anggota Keluarga 7. Karakteristik Daerah	Pengaruh Belanja Pendidikan Pemerintah Daerah Terhadap Akses Pendidikan Dasar dan Menengah di Tingkat Kabupaten/Kota / Wardani & Arsandi, 2020	Belanja pemerintah daerah bidang pendidikan berpengaruh terhadap APM, Karakteristik wilayah berpengaruh signifikan terhadap akses pendidikan dasar dan menengah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi merupakan salah satu Indikator Pembangunan Pendidikan yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan pendidikan di Indonesia. Nilai APK mengakomodir jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan dengan tidak melihat faktor usia sebagai pembatas populasi data. Hal ini karena dalam pendidikan perguruan tinggi, usia tidak memiliki pengaruh signifikan seperti pada pendidikan dasar, pertama, dan

menengah. Selain itu, capaian APK Perguruan Tinggi di Indonesia juga masih relatif kecil bila dibandingkan dengan negara regional ASEAN. Untuk itu APK PT di Indonesia perlu ditingkatkan. Merangkum dari penelitian yang dilakukan Habibah (2019), Abdul (2021), Adindha (2019), Hadiyanto (2022), dan Dharmawan (2021), penulis memilih faktor ekonomi, faktor demografi, faktor aksesibilitas, dan faktor pendukung.

Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa belanja pemerintah pusat, khususnya belanja negara sektor pendidikan, berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi pendidikan. Sehingga variabel belanja pemerintah pusat pada sektor pendidikan digunakan sebagai variabel bebas untuk menggambarkan peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendidikan. Belanja pemerintah pusat sektor pendidikan yang menasar pendidikan tinggi diantaranya adalah belanja pada instansi pendidikan tinggi pemerintah dan belanja BLU melalui layanan beasiswa melalui LPDP. Selanjutnya beasiswa LPDP digunakan sebagai variabel terikat untuk melihat pengaruh layanan beasiswa LPDP, yang merupakan belanja pemerintah dengan sumber dana hasil pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan, terhadap partisipasi pendidikan tinggi. Semakin banyak penerima manfaat beasiswa, maka semakin banyak mahasiswa yang terbebas dari tingginya biaya pendidikan tinggi yang harus dikeluarkan.

Selanjutnya, berdasarkan pernyataan dari BPS mengenai faktor ekonomi yang menjadi faktor utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Variabel bebas yang dipilih untuk menggambarkan faktor ekonomi adalah PDRB per Kapita dan Proporsi Lapangan Kerja Informal.

PDRB per Kapita digunakan untuk menggambarkan tingkat ekonomi provinsi di Indonesia. Dengan semakin tinggi tingkat ekonomi maka kemampuan untuk memperoleh pendidikan tinggi juga akan meningkat. Sedangkan Proporsi Lapangan Kerja Informal digunakan sebagai faktor potensi tambahan pendapatan bagi mahasiswa. Dengan adanya tambahan pendapatan, maka kemampuan untuk berpartisipasi pada pendidikan tinggi juga meningkat.

Kemudian faktor demografi digunakan untuk mengakomodasi kondisi bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia. Indikator yang digunakan adalah populasi masyarakat pada suatu daerah. Namun untuk mempertajam analisis mengenai pengaruh populasi pendidikan terhadap partisipasi pendidikan, variabel bebas menggunakan proporsi populasi pemuda usia 19-24 tahun. Usia ini digunakan karena sesuai dengan usia standar pendidikan tinggi yang digunakan oleh BPS. Semakin banyak pemuda berusia standar pendidikan tinggi, maka tingkat partisipasi pendidikan juga akan meningkat.

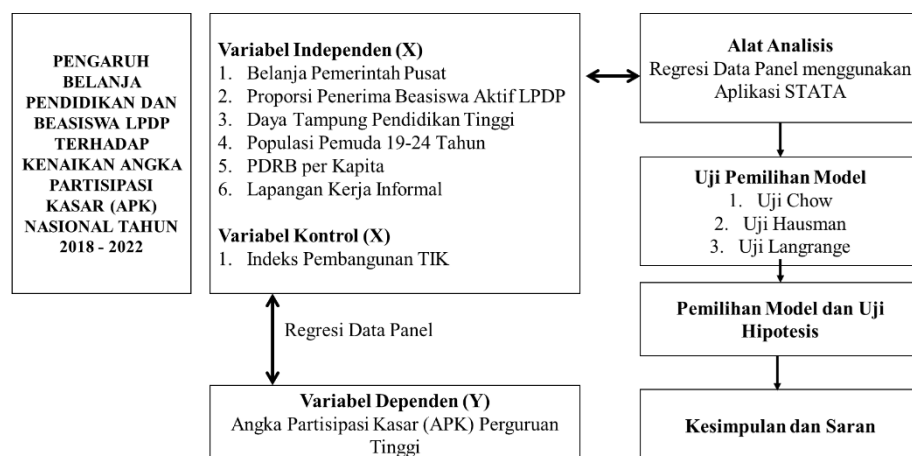
Untuk mendukung peningkatan partisipasi pendidikan tinggi maka aksesibilitas terhadap pendidikan tinggi juga harus memadai. Terutama kemampuan untuk menyerap jumlah populasi pemuda yang semakin meningkat. Untuk itu, daya tampung pendidikan tinggi digunakan sebagai variabel bebas yang menggambarkan faktor aksesibilitas terhadap pendidikan tinggi. Semakin besar daya tampung pendidikan tinggi, maka jumlah pemuda yang dapat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi pada pendidikan tinggi juga meningkat.

Terakhir, faktor lainnya yang dapat mendukung tingkat partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi adalah teknologi dan informasi. Oleh sebab itu,

dipilih capaian IPTIK tahunan pada setiap provinsi sebagai variabel kontrol untuk membantu memberikan gambaran mengenai kondisi infrastruktur penunjang pendidikan pada setiap daerah. Teknologi yang memadai dapat meningkatkan akses terhadap informasi dan komunikasi bagi masyarakat, sehingga kualitas pendidikan juga akan meningkat.

Dari penjabaran di atas telah ditentukan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel Belanja Pemerintah Pusat Bidang Pendidikan, Proporsi Penerima Beasiswa LPDP, PDRB per Kapita, Proporsi Lapangan Kerja Informal, Populasi Pemuda usia 19-24 Tahun, dan Daya Tampung Pendidikan Tinggi sebagai variabel bebas. Serta didukung dengan IPTIK daerah sebagai variabel kontrol yang menggambarkan faktor penunjang pendidikan. Seluruh variabel tersebut diduga memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). Variabel tersebut kemudian akan dilakukan analisis menggunakan metode regresi data panel. Sehingga akan diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi APK PT.

Gambar 7 Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4. Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis, penelitian mengenai indikator Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) belum banyak dilakukan. Penulis hanya menemukan penelitian yang dilakukan oleh Habibah *et al.* (2019) yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi capaian APK PT. Faktor yang digunakan dalam penelitian tersebut yang digunakan pula pada penelitian ini antara lain faktor belanja pemerintah, jumlah perguruan tinggi, PDRB per Kapita, dan Populasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencari hubungan antara variabel dalam penelitian ini dengan indikator yang sejenis yakni APK dan APM pada jenjang pendidikan lebih rendah yaitu Sekolah Menengah dan Sekolah Dasar.

Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat Bidang Pendidikan pada Indikator Pendidikan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadiyanto, *et al.* (2022) menunjukkan bahwa Belanja Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Penelitian lain yang dilakukan oleh Habibah, *et al.* (2019) menunjukkan Persentase Belanja Pemerintah di sektor pendidikan tinggi terhadap PDRB Provinsi diduga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat APK Perguruan Tinggi dan hubungannya bersifat positif. Namun hasil berbeda ditemukan oleh beberapa penelitian mengenai belanja pemerintah terhadap pendidikan, diantaranya penelitian oleh Naharin *et al.* (2023) yang meneliti

pengaruh Anggaran Pendidikan tanpa adanya transfer daerah memiliki pengaruh negatif terhadap realisasi APK SMA di Jawa Timur.

Pengaruh Program Beasiswa terhadap Partisipasi Pendidikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Primadewi, *et al.* (2016) menunjukkan bahwa program beasiswa BIDIK SIMISI di Provinsi Bali berdampak signifikan positif terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Bali. Penelitian lain memiliki hasil yang sejalan, yakni penelitian oleh Marlyana *et al.* (2019) menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa ada pengaruh informasi beasiswa S2 terhadap minat studi S2. Hasil berbeda diberikan atas penelitian mengenai pengaruh Program Indonesia Pintar (PIP), yang memberikan bantuan tunai pada siswa miskin, terhadap APM SMA/SMK di Indonesia, hasil penelitian ditemukan bahwa program PIP tidak berpengaruh signifikan terhadap capaian APM SMA/SMK tahun 2017-2020 pada 34 Provinsi (Sitanggang & Jasmina, 2023).

Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Partisipasi Pendidikan Tinggi

PDRB per kapita dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat dari perspektif ekonomi. Semakin tinggi pendapatan maka kemampuan untuk memperoleh pendidikan tinggi juga akan semakin tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan *et al.* (2020) menunjukkan hasil bahwa PDRB per Kapita dapat meningkatkan tingkat APM pada setiap jenjang pendidikan. Penelitian serupa telah dilakukan oleh Aurellin dan Sentosa (2023) menunjukkan bahwa PDRB per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap APM tingkat sekolah

menengah atas di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2015) menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap APM Pendidikan Dasar di Indonesia.

Pengaruh Usia Sekolah terhadap Partisipasi Pendidikan Tinggi

Bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia dan diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga tahun 2030 perlu dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Modal manusia yang terdidik dan terampil perlu ditingkatkan dari sisi jumlah dan kualitas daya saing untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Semakin tinggi jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah maka semakin tinggi tingkat partisipasi sekolah. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Habibah et al. (2019) menunjukkan Jumlah penduduk diduga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat APK Perguruan Tinggi dan hubungannya bersifat positif. Penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan et al., 2020) terhadap pengaruh populasi penduduk usia sekolah juga memberikan hasil yang signifikan positif pada jenjang SMP dan SMA.

Penelitian yang dilakukan oleh Connor, *et al.* (2001) untuk melihat faktor-faktor yang membuat mahasiswa pada kelas sosial tertentu untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dari beberapa faktor tersebut, didapat bahwa tingginya tingkat kompetisi untuk masuk ke perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kompetisi untuk masuk ke perguruan tinggi karena meningkatnya jumlah pemuda usia 19-24 akan memberikan pengaruh dalam partisipasi pada pendidikan tinggi bagi pemuda pada kelas sosial ekonomi tertentu.

Pengaruh Jumlah Perguruan Tinggi terhadap Partisipasi Pendidikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Habibah *et al.* (2023), menyatakan bahwa apabila Jumlah Perguruan Tinggi diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat APK PT, variabel ini juga memiliki hubungan yang negatif. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Sitanggang dan Jasmina (2023). Penelitian ini mengukur pengaruh antara jumlah sekolah per 1000 murid dengan APM Pendidikan Menengah pada tahun 2017-2020, hasil yang didapat adalah bahwa jumlah sekolah tidak berpengaruh terhadap realisasi APM. Hasil berbeda ditemukan terhadap pengaruh rasio ruang belajar dengan indikator pendidikan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Hadiyanto *et al.* (2022) dan mengungkapkan bahwa Jumlah Sekolah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Pengaruh Indeks Pembangunan TIK terhadap Pendidikan

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai peran dari penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran, khususnya pada masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan pelaksanaan pendidikan secara jarak jauh. Penelitian yang dilakukan oleh Mousumi (2022) mengemukakan bahwa akses pada perangkat belajar jarak jauh seperti laptop dan ketersediaan internet, menjadi penghalang siswa dengan kondisi ekonomi rendah untuk mengikuti pelajaran jarak jauh. Penelitian lain menunjukkan bahwa pentingnya sarana dan prasarana penunjang selain ruang kelas, yakni internet dan infokus merupakan hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan (Rajagukguk *et al.*

2023). Selanjutnya, penelitian dilakukan terhadap penggunaan internet pada Indikator Pembangunan Pendidikan (IPP) di daerah tertinggal oleh Busmah dan Sugiarto (2022). Penelitian ini mengemukakan bahwa akses terhadap internet penunjang belajar berdampak signifikan positif terhadap IPP.

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjabaran teori dan penjabaran kerangka berpikir di atas, maka penulis dapat merangkum hipotesis sebagai berikut :

- 1 H0 : Variabel Belanja Pemerintah Pusat Bidang Pendidikan diduga mempengaruhi tingkat APK PT secara signifikan

 H1 : Variabel Belanja Pemerintah Pusat Bidang Pendidikan diduga tidak mempengaruhi tingkat APK PT secara signifikan
- 2 H0 : Variabel Proporsi Penerima Beasiswa Aktif LPDP diduga mempengaruhi tingkat APK PT secara signifikan

 H1 : Variabel Proporsi Penerima Beasiswa Aktif LPDP diduga tidak mempengaruhi tingkat APK PT secara signifikan
- 3 H0 : Variabel PDRB per Kapita diduga mempengaruhi tingkat APK PT secara signifikan

 H1 : Variabel PDRB per Kapita diduga tidak mempengaruhi tingkat APK PT secara signifikan
- 4 H0 : Variabel Lapangan Kerja Informal diduga mempengaruhi tingkat APK PT secara signifikan

- H1 : Variabel Lapangan Kerja Informal diduga tidak mempengaruhi tingkat APK PT secara signifikan
- 5 H0 : Variabel Daya Tampung Pendidikan Tinggi diduga mempengaruhi tingkat APK PT secara signifikan
- H1 : Variabel Daya Tampung Pendidikan Tinggi diduga tidak mempengaruhi tingkat APK PT secara signifikan
- 6 H0 : Variabel Populasi Pemuda Usia 19-24 Tahun diduga mempengaruhi tingkat APK PT secara signifikan
- H1 : Variabel Populasi Pemuda Usia 19-24 Tahun diduga tidak mempengaruhi tingkat APK PT secara signifikan
- 7 H0 : Karakteristik Daerah dapat mengubah signifikansi variabel terikat terhadap APK PT
- H1 : Karakteristik Daerah tidak dapat mengubah signifikansi variabel terikat terhadap APK PT